



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN**

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023-2024  
KE PROVINSI JAWA TENGAH**

\*

\*

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

\*

\*

**JAKARTA 2024**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI**  
**RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023-2024**  
**KE PROVINSI JAWA TENGAH**  
**29 FEBRUARI 2024 s.d. 4 MARET 2024**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meninjau dan menghimpun informasi terkait dengan permasalahan di Bidang Pangan dan Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan Hidup. Adapun dasar hukum dari Kunjungan Kerja ini mengacu pada:

1. Peraturan Dewan Perwakilan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI Tanggal 6 Februari 2024
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 17 Januari 2024.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah, Mitra Kerja Komisi IV DPR RI terkait dengan permasalahan pasokan dan harga pangan di Provinsi Jawa Tengah;
2. Melakukan peninjauan lapangan dan berdiskusi dengan *stakeholder* terkait dengan permasalahan dan perkembangan ekspor perikanan di Provinsi Jawa Tengah; serta
3. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah terkait dengan permasalahan kerusakan lahan pertanian pasca banjir yang terjadi di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

### **C. RUANG LINGKUP**

Sasaran Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meliputi Bidang pangan dan pertanian, Lingkungan Hidup, serta Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

### **D. SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2023-2024 dipimpin oleh Bapak Budhy Setiawan (Wakil Ketua/F-PG) dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

### **E. LOKASI DAN PELAKSANAAN KUNJUNGAN**

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2023-4 Maret 2024. Lokasi yang dipilih untuk Kunjungan Kerja Reses adalah:

1. Gudang Perum Bulog Tambak Aji Jl. Raya Randugarut, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah;
2. PT Sumber Samudera Indonesia, Gg. 5, Trimulyo, Sayung, Kec. Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah; serta
3. Posko Penanganan Banjir Kabupaten Demak di Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

## II. GAMBARAN UMUM

### **Kondisi Ketersediaan Pangan dan Pertanian di Provinsi Jawa Tengah**

Berbagai media elektronik menyebutkan bahwa masyarakat di berbagai wilayah mengeluhkan harga beras medium dan premium mengalami peningkatan harga, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut juga berdampak pada ketersediaan beras di beberapa lokasi juga mengalami keterbatasan. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga telah mengupayakan berbagai kegiatan untuk menekan dan mengendalikan harga, baik dari kegiatan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar), menyalurkan bantuan pangan, hingga melakukan operasi pasar.

Berdasarkan data Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi Jateng pada Selasa (20/2/2024), harga beras jenis medium di seluruh kabupaten/kota melampaui harga acuan yang ditetapkan, yakni Rp 10.900 per kilogram. Harga beras tertinggi tercatat berada di Kabupaten Pemalang dan Wonogiri, yakni Rp 16.000 per kilogram (Kompas.id). Tak hanya beras medium, harga beras premium di seluruh wilayah di Jateng juga lebih tinggi dari harga acuan, sebesar Rp 12.900 per kilogram. Ada lima daerah dengan harga beras premium tertinggi di Jateng, yakni Wonogiri, Kota Surakarta, Kudus, Kota Tegal, dan Kota Magelang. Di lima daerah itu, harga beras premium mencapai Rp 17.000 per kilogram.

Provinsi Jawa Tengah memiliki peran dalam produksi padi Nasional. Berdasarkan catatan yang dihimpun, terdapat delapan wilayah yang menjadi tumpuan produksi beras di Jawa Tengah, yaitu Sragen, Sukoharjo, Pemalang, Banyumas, dan Klaten. Tetapi, BPS mencatat, terjadi penurunan produksi sepanjang tahun Tahun 2023. Provinsi Jawa Tengah menjadi urutan ketiga yang mengalami penurunan produksi. Tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah memproduksi 5223,80 ribu ton dan mengalami penurunan produksi 156,61 ribu ton (cnbcindonesia.com).

### **Gambaran Umum PT Sumber Samudera Indonesia**

Kekayaan laut Indonesia merupakan sektor yang dapat mendatangkan banyak devisa yang melimpah salah satunya dengan ekspor hasil laut olahan ke pasar global. PT Sumber Samudera Indonesia (PT SSI) Semarang Jawa Tengah adalah

salah satu perusahaan atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mengolah ikan dan mengekspor produk olahan ikan ke berbagai negara. Pada tahun 2023 PT SSI telah mengekspor berbagai produk olahan perikanan sebanyak 2.7 ribu ton. PT SSI merupakan perusahaan PMA asal China yang berada di kawasan industri Terboyo Semarang dengan bidang usaha industri pengolahan dan pengawetan ikan. Daam memenuhi kebutuhan pasokan ikan, PT SSI menjalin kemitraan dengan nelayan dan pemilik tambak. Dalam kemitraan tersebut, PT SSI memesan kepada nelayan atau penambak ukuran ikan yang akan dibeli. Beberapa produk perikanan yang diekspor diantaranya adalah:

1. Frozen Demersal: Ikan kakak tua, kakap merah, bawal putih, kurisi, bawal hitam, lencam
2. Frozen Pelagic: Tengiri, mahi-mahi
3. Frozen Cephalopod: Cumi-cumi, gurita,
4. Frozen Shrimp: Lobster, udang vaname
5. Frozen Shellfish: kerang batik, kerang dara, kerang hijau
6. Frozen Moa: Sidat
7. Frozen Milkfish: Bandeng
8. Frozen Tuna: Tuna Frozen
9. Frozen Crab: Kepiting
10. Frozen Snail (Mollusca): Daging keong
11. Frozen Shark: Hiu
12. Frozen Stingray (On Process): Pari

Dalam menunjang produksinya, PT SSI memiliki fasilitas berupa:

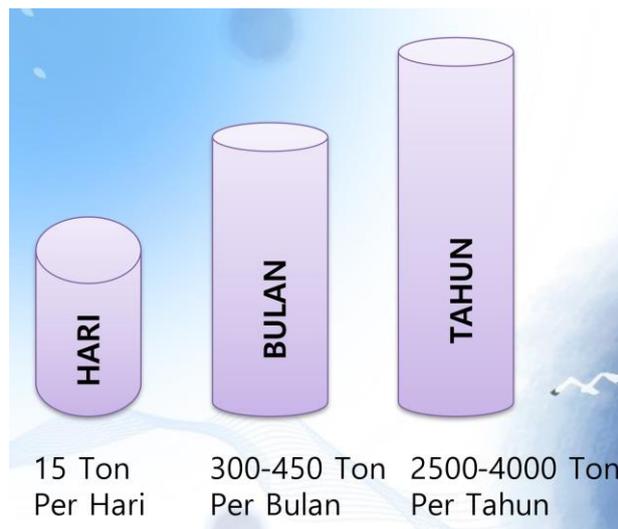
1. 3 unit ABF (Air Blash Freezer) kapasitas 20 ton
2. 1 Uni IQF (Individual Quick Freezer) kapasitas 1jam 20ton
3. 3 unit Cold Storage kapasitas 1500 ton



ABF

IQF

Cold Storage



Kapasitas Produksi

## Banjir di Kabupaten Demak

Banjir menerjang 9 Kecamatan di Kabupaten Demak dikarenakan hujan deras di wilayah hulu dan debit air mengalami peningkatan sehingga menyebabkan 2 titik tanggul sungai jebol. Adapun bencana banjir tersebut, pertama kali terjadi pada tanggal 6 Februari 2024. Beberapa kecamatan yang mengalami banjir antara lain:

1. Kecamatan Kebonagung dikarenakan meluapnya Sungai Tuntang. Desa yang terdampak adalah Pilangwetan, Kebonagung, Tlogosih, dan Solowire, Megonten, dan Babat;
2. Kecamatan Wonosalam dikarenakan meluapnya Sungai Jajar dan Sungai Tuntang serta jebolnya Tanggul berdampak ke Desa Doreng, Kendaldoyong, Tlogodowo, Kalianyar, Wonosalam, Karangrowo, Tlogorejo, Karangrejo, dan Lempuyang;

3. Kecamatan Dempet dikarenakan meluapnya Sungai Lusi dan Sungai Teleng yang berdampak ke desa Merak, Brakas, Balerejo, Sidomulyo, dan Dempet;
4. Kecamatan Karangawen dikarenakan meluapnya Sungai Setu dan Sungai Cabean serta jebolnya tanggul Wangun dan Singopadu yang berdampak ke desa Bumirejo, Sidorejo, dan Rejosari;
5. Kecamatan Mranggen dikarenakan meluapnya sungai Setu dan berdampak ke Desa Candisari; serta
6. Kecamatan Guntur dikarenakan meluapnya Sungai Cabean dan berdampak ke Desa Tlogoweru.

Pada tanggal 8 Februari 2024 kembali terjadi banjir di beberapa kecamatan, diantaranya:

1. Kecamatan Karanganyar dikarenakan meluapnya Sungai Lusi dan jebolnya tanggul Sungai Wulan yang berdampak ke desa Undaan Kidul, Cangkring, Wonorejo, Cangkring rembang, Ngalaran, Bandungrejo, Jatirejo, Wonoketingal, dan Karanganyar;
2. Kecamatan Gajah dikarenakan jebolnya tanggul Sungai Wulan yang berdampak ke Desa Sari dan Desa Gajah; serta
3. Kecamatan Mijen dikarenakan meluapnya sungai Kanal Lor dan limpasan air dari Jatirejo yang berdampak ke desa Ngelowetan, Geneng, Mlaten, dan Bakung.

Di beberapa kecamatan tersebut, lahan pertaniannya juga terdampak banjir dan dinyatakan puso, diantaranya lahan pertanian padi, jagung, dan bawang merah. Disamping itu, terdapat ternak yang terdampak banjir. Untuk lahan pertanian komoditas padi, diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.180.355.000, adapun rincian luasannya yang mengalami puso, diantaranya:

NO	KECAMATAN	TERGENANG (Ha)	PUSO (Ha)
1	Kebonagung	189	79
2	Wonosalam	515	186
3	Dempet	469	77
4	Karangawen	294	47
5	Mranggen	15	7
6	Guntur	105	83
7	Karanganyar	1556	1556

8	Gajah	47	47
9	Mijen	130	0
<b>JUMLAH</b>		<b>3.280</b>	<b>2.082</b>

Lahan pertanian komoditas bawang merah yang terdampak dan dinyatakan puso, diantaranya:

NO	KECAMATAN	TERGENANG (Ha)	PUSO (Ha)
1	Gajah	17	17
2	Mijen	41	41
<b>JUMLAH</b>		<b>58</b>	<b>58</b>

Lahan pertanian komoditas jagung yang terdampak dan sudah dinyatakan puso, diantaranya:

NO	KECAMATAN	TERGENANG (Ha)	PUSO (Ha)
1	Karangawen	121	18
<b>JUMLAH</b>		<b>121</b>	<b>18</b>

Populasi ternak yang terdampak banjir, antara lain:

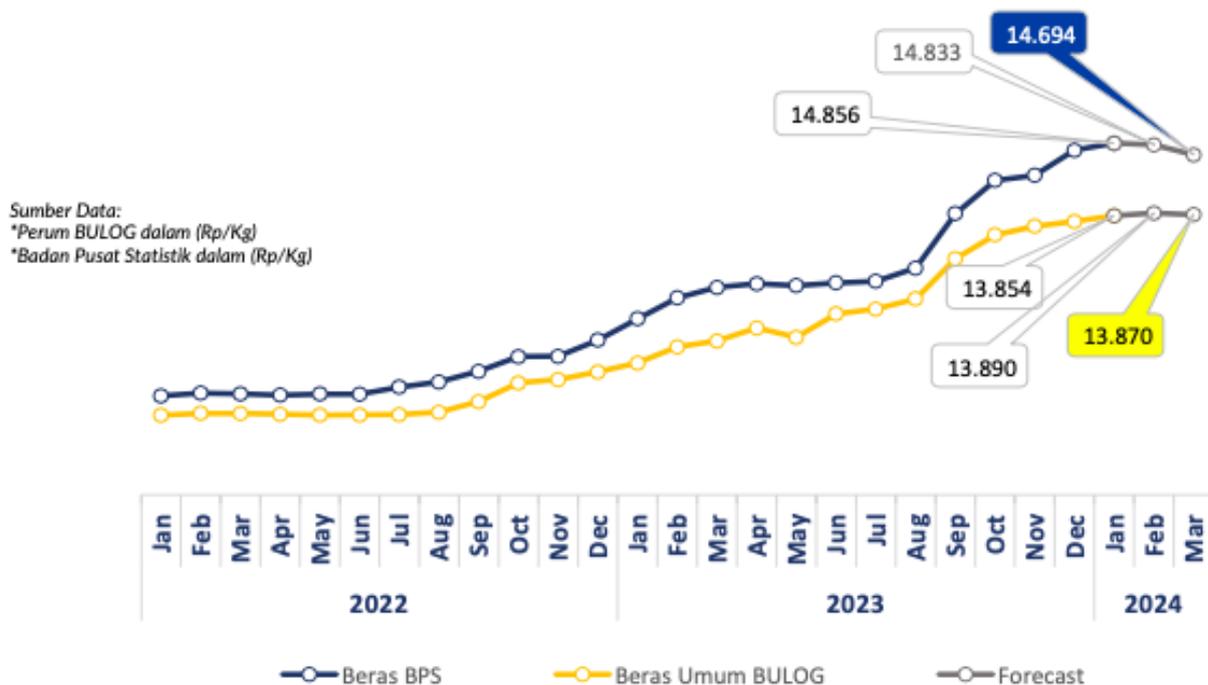
Kecamatan	Desa	Populasi (Ekor)			
		Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
Karanganyar	Ds. Cangkring			40	50
	Ds. Cangkring Rembang			12	53
	Ds. Karanganyar	4		20	46
	Ds. Ketanjung		23	2	52
	Ds. Undaan Kidul		17	3	58
	Ds. Undaan Lor	48	18		692
	Ds. Wonorejo		2	56	135
	Ds. Ngemplik Wetan		5		
Wonosalam	Ds. Doreng	3	1	15	5
	Ds. Kalianyar	11	4		12
	Ds. Karangrowo		2	9	
	Ds. Kendaldoyong	8		9	
	Ds. Lempuyang			23	13
	Ds. Tlogodowo		9	21	125
	Ds. Tlogorejo	2		8	840
Karangawen	Ds. Rejosari	150		150	150

	Ds. Sidorejo	200	25	200	200
Gajah	Ds. Tanjunganyar	3	19	244	367
	Ds. Mojosimo			47	109
	Ds. Sambung		19	113	37
	Ds. Sambiroto	7	4	25	102
	Ds. Banjarsari	2	7	21	111
	Ds. Gedangalas			80	
<b>TOTAL</b>		<b>438</b>	<b>155</b>	<b>1098</b>	<b>3157</b>

### III. HASIL KUNJUNGAN

#### Gudang Perum Bulog Tambak Aji

Pada Pertemuan kali ini, Direksi Perum Bulog memberikan penjelasan terkait progress yang telah dilakukan oleh Perum Bulog hingga hari ini. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, pada bulan Maret 2024 harga beras mengalami penurunan sebesar 0,93% yaitu Rp14.694 dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu Februari 2024 dengan nilai Rp14.833. Perum Bulog juga mencatat bahwa trend harga beras (premium dan medium) mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya masih mengalami peningkatan.



Dalam menstabilkan harga beras yang mengalami peningkatan, Perum Bulog telah melakukan serangkaian kegiatan yaitu melakukan operasi pasar/SPHP dan aksi siaga dimana per 26 Februari 2024, Perum Bulog telah menyalurkan 323.005 ton beras serta menyalurkan Bantuan Pangan Tahun 2024 yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran 22 juta KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras pada periode Januari-Juni 2024 dengan total realisasi Nasional senilai 42,05% atau 277.580 ton beras per 26 Februari 2024. Disamping itu, untuk menekan harga komoditas lainnya, per 26 Februari 2024, Perum Bulog juga telah menyalurkan jagung kepada peternak ayam seluruh Indonesia dengan nilai 49% atau sebesar 169 ribu ton serta menjual minyak goreng Simirah sebesar 7.703,98 ton.

Saat ini, masa panen mengalami kemunduran (2 bulan) dikarenakan anomali cuaca/El Nino yang mempengaruhi produksi dan inflasi Nasional (pada bulan Januari inflasi mengalami peningkatan 0,03% dan diperkirakan akan terus mengalami pergerakan hingga masa panen Tahun 2024). Andil/sumbangan inflasi beras terlihat menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Andil/sumbangan inflasi diperkirakan akan terus terjadi hingga musim panen tahun 2024 dan diperkirakan masa panen mengalami kemunduran mengingat musim tanam bergeser akibat cuaca ekstrem dan El Nino. Dikarenakan kemunduran masa panen, Perum Bulog tidak bisa melakukan pengadaan dalam Negeri (terbatas) karena harga gabah/beras masih tinggi dan pengadaan beras Perum Bulog saat ini bergantung pada beras impor. Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, rencana kedatangan impor beras Tahun 2024 di Pelabuhan Tanjung Emas Kanwil Jawa Tengah sejumlah 21.250 ton dengan jenis *Vietnam white rice 5% broken*.

Perum Bulog tidak mampu secara maksimal menyerap gabah/beras Dalam Negeri dikarenakan harga petani/penggilingan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah (HPP) sehingga dibutuhkan dukungan dari DPR RI dan Pemerintah agar dilakukan penyesuaian HPP (namun beresiko pada peningkatan inflasi). Perum Bulog juga mengusulkan untuk memberlakukan HET khusus beras premium dikarenakan pola konsumsi

masyarakat yang lebih memilih beras premium atau mediumplus. Dukungan perubahan HET dan pemberlakuan HPP beras premium juga bertujuan untuk membantu penggilingan padi (90% penggilingan padi skala kecil) agar dapat merevitalisasi penggilingannya.

Perum Bulog melaporkan bahwa pada Tahun 2023, Perum Bulog mendapatkan kuota impor (Persetujuan Impor (PI)) sebesar 2 juta ton dan sudah terealisasi 100%. Impor beras dilakukan secara bertahap (8 kali tahapan Kontrak dengan Importir) dan dilaksanakan sejak bulan Maret s.d September 2023. Di Tahun yang sama, Perum Bulog juga mendapatkan penugasan kembali sebesar 1,5 juta ton dan telah terealisasi 60%. Penugasan tersebut telah dilaksanakan secara bertahap dalam 3 kali tahapan kontrak dengan importir yang dilaksanakan sejak bulan Oktober s.d Desember 2023 (sisa persetujuan impor sejumlah 600 ribu ton dilakukan *Carry Over* atau Perpanjangan Persetujuan Impor di Tahun 2024). *Carry Over* Persetujuan Impor (PI) sejumlah 600 ribu ton pada tahun 2023 telah terealisasi 50,13% atau sejumlah 300,78 ribu ton. Sisa *Carry Over* PI Tahun 2023 adalah sejumlah 299,22 ribu ton. Sedangkan untuk Tahun 2024, Pemerintah sudah menerbitkan Persetujuan Impor (PI) sejumlah 2 juta ton dan telah terkontrak sejumlah 500 ribu ton atau 33,33% dengan realisasi penugasan beras impor sebesar 364,78 ribu ton.

Kegiatan penerapan beras/gabah petani dan impor beras dilakukan oleh Perum Bulog guna memenuhi Cadangan Beras Pemerintah dalam 1 tahun. Saat ini, Perum Bulog memiliki 1.385.417 ton yang tersebar di Gudang Perum Bulog seluruh Indonesia dan masih dikategorikan cukup untuk menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024.

Permasalahan yang terjadi ketika penyaluran beras impor adalah terdapat antri bongkar kapal di beberapa pelabuhan sehingga menyebabkan pelambatan dalam penyaluran. Solusi yang saat ini dilakukan oleh Perum Bulog adalah dengan menyalurkan beras impor ke wilayah yang memiliki pelabuhan kecil dengan kapasitas kecil.

### **Tanggapan Badan Pangan Nasional:**

Badan Pangan Nasional menjelaskan bahwa Perum Bulog telah melaksanakan penugasan impor beras dari Badan Pangan Nasional di Tahun 2023 dan 2024. Impor beras yang dilakukan bertujuan untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah agar tidak dibawah ambang batas/ideal setiap tahunnya dan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi.

Pada kesempatan yang sama, Badan Pangan Nasional mengapresiasi kinerja Perum Bulog yang telah mengendalikan pasokan dan harga beras Nasional dengan melakukan operasi pasar dan penyaluran bantuan sosial yang stoknya berasal dari impor. Diharapkan pada masa panen Nasional bulan Maret-Mei 2024 yaitu produksi Nasional dapat mencapai 3,5 juta ton setara beras dan diharapkan dapat membantu menekan impor beras.

Salah satu faktor terjadinya kenaikan harga beras disebabkan oleh keterbatasan pupuk subsidi dan mengakibatkan petani menggunakan pupuk komersil yang harganya sangat tinggi. Diharapkan Pemerintah segera merealisasikan tambahan anggaran pupuk subsidi Tahun 2024 agar dapat menekan harga beras/gabah yang hingga saat ini kondisinya masih tinggi.

Disamping itu, Bapanas merekomendasikan agar Perum Bulog memiliki kemitraan dengan petani di sejumlah wilayah sentra padi Nasional (minimal 500 ribu Ha) guna memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah dalam 1 tahun. Untuk merealisasikan strategi tersebut, Bapanas membutuhkan dukungan dari DPR RI dan Pemerintah yaitu dukungan anggaran, agar Perum Bulog dapat menyerap gabah/beras petani dan tidak bersaing dengan pihak swasta.

Berdasarkan data panel Bapanas yang terbit setiap hari, HPP beras medium per 29 Februari 2024 senilai Rp9.950/kg, rata-rata Nasional Rp13.570/kg, harga beras tertinggi berada di DIY dengan nilai Rp15.040/kg dan terendah berada di Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp12.570/kg.

Harga beras Premium per 29 Februari 2024, rata-rata Nasional senilai Rp14.880/kg, harga tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar Rp17.000/kg, dan terendah berada di Provinsi Sumatera Selatan

Rp12.800/kg. Disamping itu, Harga rata-rata gabah (GKP) Provinsi Jawa Tengah per 29 Februari 2024 senilai Rp7.070/kg sedangkan harga rata-rata GKG Provinsi Jawa Tengah per 29 Februari 2024 senilai Rp8.130/kg (asumsinya harga GKP 2 kali lipat dari harga beras).

### **Tanggapan Kementerian Pertanian:**

Terkait dengan berbagai permasalahan yang terjadi, Kementerian Pertanian menyoroti tingginya harga dikarenakan stok beras yang terbatas. Kementerian Pertanian terus melakukan upaya percepatan tanam di beberapa wilayah dan mengupayakan agar anggaran tambahan 14 Triliun untuk pupuk subsidi dapat segera digunakan untuk menambah alokasi pupuk subsidi di Tahun 2024.

### **Tanggapan Pemerintah Daerah:**

Hingga saat ini, keamanan pangan di Provinsi Jawa Tengah terjamin dengan baik melalui program SPHP, gerakan pangan murah, maupun penyaluran Cadangan Beras Provinsi. Upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menekan harga dan memenuhi pasokan beras adalah dengan melakukan pemantauan harga pangan *by system* setiap harinya. Pemantauan tersebut dilakukan guna mengetahui penyebab kenaikan harga pangan yang terjadi di tingkat konsumen sehingga Pemerintah Daerah dengan sigap menugaskan PT Jateng Agro Berdikari (BUMD yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah) melakukan operasi pasar guna mengoreksi harga pangan yang terlalu tinggi di tingkat konsumen.

Contohnya: Harga beras Medium di Provinsi Jawa Tengah sempat mengalami peningkatan hingga Rp16.200/kg dan per tanggal 23 Februari 2024 rata-rata harga beras medium mencapai Rp15.100/kg. Harga beras Medium di kota Semarang rata-rata diangka Rp15.000/kg sedangkan Provinsi Jawa Tengah sudah dibawah Rp14.600/kg.

Strategi selanjutnya yang telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah adalah dengan mendorong terbentuknya sistem logistik daerah (beberapa daerah sudah terbentuk) dan BUMD di masing-masing wilayah (wonogiri, sukoharjo, cilacap, purworejo, dan lainnya). Tahun 2024, stok beras Provinsi Jawa Tengah mencapai 320 ton (sisa hingga 29 Februari 2024 mencapai 214 ton) dan terus

disalurkan ke daerah yang tingkat kemiskinan tinggi dan wilayah yang rawan terjadi kenaikan harga beras.

Terkait dengan stok dan harga beras, permasalahan utama yang sering terjadi adalah kemampuan beli masyarakat daerah yang rendah (gabah/beras) dibandingkan dengan penebas padi/tengkulak dari luar daerah. Disamping itu, terdapat permasalahan lainnya yaitu 4 Kabupaten di Jawa Tengah ketika lahan pertanian mengalami kerusakan dikarenakan musim hujan. 4 Kabupaten tersebut antara lain Grobogan, Demak, Kudus, dan Brebes. Kabupaten Demak terdapat 3067 ha lahan (padi, jagung, dan bawang merah), Kabupaten Kudus dengan luas lahan 212 Ha (khususnya padi), Kabupaten Grobogan dengan luas 5348 Ha, dan Kabupaten Brebes dengan luas 1181 Ha.

Untuk Kota Semarang, di bulan Januari-Februari 2024, harga beras mengalami penurunan. Harga beras premium di Bulan Januari 2024 senilai Rp15.990/kg, bulan Februari 2024 mengalami penurunan menjadi Rp15.450/kg. Beras Medium di Bulan Januari 2024 senilai Rp15.490/kg dan bulan Februari 2024 mengalami penurunan menjadi Rp14.430/kg. Stok beras di kota Semarang surplus dan dapat digunakan hingga 3 bulan 4 hari kedepan. Perum Bulog juga memiliki Gudang di kota Semarang yang dapat memudahkan intervensi apabila terjadi fluktuasi harga dan pasokan beras. Adapun terkait dengan stabilisasi harga dan pasokan pangan, Pemerintah Daerah Kota Semarang juga telah melakukan 46 kegiatan gerakan pangan murah hingga bulan April 2024, lumbung pangan juga telah terbentuk di setiap kelurahan (80 lumbung pangan kota Semarang).

#### **Tanggapan Komisi IV DPR RI:**

Berdasarkan pemaparan mitra sebelumnya, beras menjadi komoditas kebutuhan utama masyarakat dan Provinsi Jawa Tengah juga sebagai provinsi penyumbang beras Nasional, namun harga beras mengalami peningkatan. Komisi IV DPR RI menyoroti jika tren harga beras mengalami peningkatan, maka akan sulit kembali pada harga awal (posisi semula/harga beras akan mengalami penurunan tetapi tidak akan turun hingga ke angka awal). Oleh karena itu, perlu menjadi atensi bagi Bapanas dan Perum Bulog terkait dengan

tata niaga dan logistik pangannya karena salah satu yang menyebabkan peningkatan harga dikarenakan produksi beras Dalam Negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan Nasional. Di beberapa media telah menyebutkan bahwa Tahun 2024 impor beras mengalami peningkatan. Komisi IV DPR RI tidak anti dengan impor beras, tetapi yang diharapkan ketersediaan pangan terjamin (produksi, tata niaga, dan logistik terjamin) agar harga tetap stabil.

Disamping itu, Komisi IV DPR RI juga menyikapi adanya perbedaan data yang dimiliki oleh Bapanas dan Perum Bulog dimana tren harga beras premium mengalami peningkatan (yang disampaikan oleh Bapanas dalam media elektronik). Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa upaya Perum Bulog dalam menekan harga beras belum terlalu signifikan karena kebutuhan masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penyaluran beras dalam rangka pengendalian harga. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI meminta Mitra lebih transparan dalam penyampaian data pangan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Komisi IV DPR RI juga meminta perhitungan data pangan dapat dihitung secara cermat dan disampaikan secara benar agar dapat menekan impor pangan. Dan Pemerintah perlu membuat kajian yang komprehensif terkait dengan dasar dilakukan impor beras.

Komisi IV DPR RI juga menyoroti kebijakan Pemerintah yang akan melakukan impor beras disaat musim panen pada Tahun 2024. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar melakukan kajian terkait dengan dampak kebijakan pupuk subsidi yang terbatas, pupuk komersil yang mahal, dan masuknya beras impor yang beresiko terhadap penurunan kesejahteraan petani.

Adanya kenaikan harga beras yang disebabkan oleh terbatasnya alokasi pupuk subsidi dan tingginya harga pupuk komersil, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar segera merealisasikan tambahan anggaran pupuk subsidi 14 Triliun. Disamping itu, Komisi IV DPR RI juga meminta Pemerintah untuk memperbaiki teknis tebus pupuk subsidi yang masih menggunakan 2 metode (KTP dan Kartu Tani).

Beberapa waktu yang lalu, media elektronik juga sempat memberitakan terkait dengan isu beras SPHP yang kurang/tidak layak untuk dikonsumsi. Dari

permasalahan tersebut diharapkan Perum Bulog meningkatkan dan memberikan kualitas terbaik untuk masyarakat dan meminta Perum Bulog untuk segera melakukan kampanye yang massif untuk menetralkan isu negatif terkait dengan beras SPHP.

Komisi IV DPR RI juga mengharapkan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan dan menerapkan lumbung pangan Daerah yang digunakan untuk stabilisasi pangan. Hal tersebut juga membantu Pemerintah Daerah agar tidak bergantung pada kegiatan yang dilakukan oleh Perum Bulog atau Bapanas seperti operasi pasar maupun penyaluran bantuan sosial.

### **PT Sumber Samudera Indonesia**

#### **Kendala dan Aspirasi PT Sumber Samudera Indonesia:**

1. Dalam menunjang perizinan internasional PT SSI perlu mengajukan permohonan izin atau sertifikasi pengolahan limbah, mohon untuk arahan dan bantuannya dalam perizinan tersebut;
2. PT. Sumber Samudera Indonesia ingin menambah lapangan pekerjaan dengan mengaktifkan gedung baru untuk proses impor-ekspor, namun PT Sumber Samudera Indonesia belum mendapatkan kuota impor;
3. Pada produk shrimp atau udang PT Sumber Samudera Indonesia diminta untuk izin BAP/ASC tambak, namun di Jawa Tengah belum ada tambak yang bersertifikasi tersebut; serta
4. Dalam lingkup perikanan supplier banyak yang belum memiliki sertifikat CPIB yang mana hal ini di persyaratkan dalam HACCP perusahaan, sehingga perusahaan yang membantu mereka dalam penerbitan perizinan, namun juga terhambat oleh supplier yang tidak ingin untuk disertifikasi.

#### **Tanggapan dan Rekomendasi Komisi IV DPR RI:**

1. Komisi IV DPR RI mendorong agar PT Sumber Samudera Indonesia (SSI) dan Unit Pengolahan Ikan lainnya agar memberikan dukungan konkret untuk kesejahteraan nelayan. Salah satunya, dengan membeli ikan segar dari para nelayan dengan harga yang bisa menyejahterakan kehidupan para pelaku perikanan termasuk nelayan;

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengurangi dan membatasi penjualan produk perikanan berupa bahan mentah ke pasar global dengan mengganti produk-produk yang telah diolah agar berlaku perikanan dan negara mendapatkan nilai tambah;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat secara masif mengenai penanganan ikan pasca produksi agar produk perikanan masyarakat dapat diterima oleh pasar global/ekspor serta memiliki nilai tambah; serta
4. Komisi IV DPR RI meminta PT SSI untuk berkirin surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait proses pengajuan izin atau sertifikasi pengolahan limbah. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan pendampingan kepada PT SSI.

### **Posko Penanganan Banjir Kabupaten Demak**

#### **Tanggapan dari Balai Besar Juwana Pemali Juana Kementerian PUPR:**

Kepala Balai Besar Juwana Pemali Juana menjelaskan bahwa akibat dari hujan deras, 2 titik tanggul jebol karena tidak sanggup menahan debit air yang besar. Oleh karena itu, Kementerian PUPR telah melakukan upaya penutupan dan pengeringan tanggul yang telah membanjiri Kawasan lahan pertanian dan pemukiman serta melakukan pompanisasi dengan menggunakan 22 unit pompa (kondisinya hingga saat ini telah mengalami penyusutan). Balai besar Juwana Pemali Juana juga telah mengatasi dan menutup tanggul-tanggul di saluran irigasi sekunder dan meminta dukungan dari dinas KSDA Provinsi Jawa Tengah untuk juga memperbaiki OP saluran irigasi. Langkah selanjutnya, Kementerian PUPR di Tahun 2024 juga telah mengagendakan normalisasi sungai wulan seluas  $\pm 30$  km. Saat ini, Balai Besar telah mengidentifikasi permasalahan tanggul yang ada di Kabupaten Demak dan telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar tanggul-tanggul yang kondisinya kritis di sekitar sungai Wulan Hulu di Kabupaten Demak agar mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat.

### **Tanggapan Kementerian Pertanian:**

Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak berdampak pada lahan pertanian komoditas padi, jagung, bawang merah, dan sektor peternakan. Terdapat 3.280 Ha sawah tergenang dan 2.082 Ha mengalami puso dengan total kerugian hingga mencapai 20 Miliar, 121 Ha lahan jagung tergenang, dan 18 Ha mengalami puso, serta lahan pertanian komoditas bawang merah 58 Ha tergenang dan 58 Ha mengalami puso. Sektor peternakan di Kabupaten Demak juga mengalami banjir yaitu 438 ekor sapi, 155 ekor kerbau, 1098 ekor kambing, dan 3157 ekor domba.

Kementerian Pertanian telah melakukan aksi cepat dengan memberikan bantuan persemaian sebanyak 65,4 ton (dari 500 ton) dan telah diserahkan kepada kelompok tani di desa Ngaluran Kecamatan Karanganyar sebanyak 8,1 ton. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan pupuk sebanyak 30 Ton, *Combine Harvester* Besar sebanyak 10 Unit, Traktor roda 4 sebanyak 2 Unit, Traktor roda 2 sebanyak 8 Unit, Pompa air sebanyak 10 Unit, RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier) sebanyak 10 titik, dan AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) senilai Rp. 476.400.000.

### **Tanggapan Kementerian LHK:**

Terkait dengan banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, KLHK direncanakan akan membuat vegetasi di sekitar area DAS Hulu, membangun embung-embung kecil yang berfungsi sebagai proteksi air dan menahan supply penyebab banjir. Pemerintah Pusat diharapkan memperhatikan alih fungsi lahan penyebab banjir yang ada di Kabupaten Demak. Alih fungsi lahan tersebut menyebabkan sedimen mengalami penumpukan dan air menjadi keruh. Balai selalu melakukan normalisasi di sisi hulu karena air di hilir terlalu banyak sedimen dan jarang dilakukan normalisasi. Disamping itu, Wilayah Karanganyar tidak mengalami penyusutan karena aliran tidak bisa mengalir air. Diharapkan hal tersebut menjadi perhatian bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **Tanggapan dan Aspirasi dari Petani, masyarakat, dan Dinas Lainnya:**

1. Sejak 4 tahun belakangan ini di perbatasan Desa Merak sampai Desa Bugel Kecamatan Dempet mengalami rawan banjir. Beberapa waktu yang lalu, tanggul yang ada di desa Bugel juga jebol sebesar 50 m. Hal ini disebabkan sungai yang ada di desa Bugel debitnya terlalu tinggi (akibat musim hujan). Oleh karena itu, meminta Pemerintah dan DPR RI memberikan perhatian pada tanggul tersebut dikarenakan berpotensi jebol dan banjir;
2. Meminta Pemerintah agar menormalisasikan tanggul-tanggul yang jebol. Disamping itu, meminta agar menormalisasikan saluran di sekitar tanggul yang jebol;
3. Lahan pertanian tidak bisa ditanami karena tanggul jebol. Oleh karena itu, membutuhkan perhatian dari Pemerintah; serta
4. Pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi terhadap bantuan-bantuan yang diberikan kepada petani dan masyarakat.

### **Tanggapan Komisi IV DPR RI:**

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk segera memperbaiki jaringan irigasi dan menyalurkan bantuan benih kepada petani mengingat Kabupaten Demak memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian;
2. Komisi IV DPR RI juga meminta kepada Kementerian Pertanian memberikan bantuan dana HOK bagi petani yang terdampak banjir di Kabupaten Demak;
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera melakukan percepatan pemulihan lahan pertanian milik warga;
4. Komisi IV DPR RI juga mendorong Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR agar segera melakukan pembenahan tanggul serta saluran irigasi yang menjadi penunjang pertanian di Kabupaten Demak;
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan perhatian pada jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya di Kabupaten Demak yang berusia tua, usang, dan minim pemeliharaan karena jaringan irigasi yang berpengaruh pada produktivitas pertanian;

6. Komisi IV DPR RI akan meminta dukungan kepada Komisi V DPR RI agar segera memperbaiki tanggul-tanggul rusak/using/lainnya guna mendukung produksi pertanian daerah;
7. Komisi IV DPR RI perlu mendapatkan informasi terkait dengan seluruh kerusakan infrastruktur pendukung pertanian dan Komisi IV DPR RI meminta adanya koordinasi dan sinkronisasi lintas Kementerian (Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian) untuk memperbaiki seluruh irigasi pendukung lahan pertanian baik di Kabupaten Demak maupun di wilayah lain di seluruh Indonesia; serta
8. Komisi IV DPR RI meminta Balai Penyuluh Pertanian dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi dan mensurvey permasalahan di lahan pertanian (lahan yang rusak/bisa ditanami) agar bantuan bisa tepat sasaran.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Komisi IV DPR RI meminta atensi Bapanas dan Perum Bulog terkait dengan tata niaga dan logistik pangan karena penyebab peningkatan harga beras, salah satunya dikarenakan produksi beras Dalam Negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan Nasional;
2. Komisi IV DPR RI meminta Mitra lebih transparan dalam penyampaian data pangan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar;
3. Komisi IV DPR RI juga meminta perhitungan data pangan dapat dihitung secara cermat dan disampaikan secara benar agar dapat menekan impor pangan. Dan Pemerintah perlu membuat kajian yang komprehensif terkait dengan dasar dilakukan impor beras;
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar melakukan kajian terkait dengan dampak kebijakan pupuk subsidi yang terbatas, pupuk komersil yang mahal, dan masuknya beras impor yang beresiko terhadap penurunan kesejahteraan petani;
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar segera merealisasikan tambahan anggaran pupuk subsidi 14 Triliun. Komisi IV DPR RI juga

- meminta Pemerintah untuk memperbaiki teknis tebus pupuk subsidi yang masih menggunakan 2 metode (KTP dan Kartu Tani);
6. Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk meningkatkan dan memberikan kualitas terbaik bagi masyarakat dan meminta Perum Bulog untuk segera melakukan kampanye yang massif dalam rangka menetralsisir isu negatif terkait dengan beras SPHP;
  7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengurangi dan membatasi penjualan produk perikanan berupa bahan mentah ke pasar global dengan mengganti produk-produk yang telah diolah agar perilaku perikanan dan negara mendapatkan nilai tambah;
  8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat secara masif mengenai penanganan ikan pasca produksi agar produk perikanan masyarakat dapat diterima oleh pasar global/ekspor serta memiliki nilai tambah;
  9. Komisi IV DPR RI meminta PT. SSI untuk berkirim surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait proses pengajuan izin atau sertifikasi pengolahan limbah. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan pendampingan kepada PT SSI;
  10. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk segera memperbaiki jaringan irigasi dan menyalurkan bantuan benih kepada petani mengingat Kabupaten Demak memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian;
  11. Komisi IV DPR RI juga meminta kepada Kementerian Pertanian memberikan bantuan dana HOK bagi petani yang terdampak banjir di Kabupaten Demak; serta
  12. Komisi IV DPR RI juga mendorong Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR agar segera melakukan pembenahan tanggul serta saluran irigasi yang menjadi penunjang pertanian di Kabupaten Demak.

## V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak dan akan kami bawa dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Jakarta, Maret 2024

Ketua Tim,

Ttd.

**Budhy Setiawan**

A-290

## MITRA PENDAMPING

### KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan : **Batara Siagian, SP., MAB**
2. Kepala BSIP Jawa Tengah : **Arif Surahman, S.Pi, M.Sc, Ph.D**
3. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Ditjen PKH) : **drh. Syamsul Ma'arif, M.Si**

### KKP

1. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP): **Dr. Budi Sulistiyo, M.Sc (Es 1)**
2. Sesditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP): **Machmud, SP.,M.Sc**

### KLHK

1. Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: **Dr. M. Saporis Soedarjanto, S.Si., M.T.**
2. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: **Drs. Dasrul, M.M., M.E., M.H**
3. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun: **Rochimah Nugrahini, S.Hut., M.Si**
4. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo: **Dr. Marcus Octavianus Susatyo, S.Hut., M.P**
5. Kepala BKSDA Jawa Tengah: **Darmanto, S.P., M.AP**
6. Kepala Balai TN Karimunjawa: **Widyastuti, S.H., M.Hum**
7. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo: **Ir. Yoyok Sigit Haryotomo, M.M**

**BAPANAS** : **Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H** (Sekretaris Utama (Sestama))

**PERUM BULOG** : **Sonya Mamoriska** (Direktur Transformasi & Hubungan Kelembagaan)

**PT PUPUK INDONESIA** : **Saifullah Lasindrang** (Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)

### ID FOOD

1. Direktur Komersial ID FOOD: **Nina Sulistyowati**
2. Dirut PT Perikanan Indonesia: **Sigit Muhartono**

**Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Provinsi Jawa Tengah : Bp. Bergas Catursasi Penanggungan, S.Sos., M.Si**

**Ka. Distanbun Prov. Jateng: Bp. Supriyanto, SP, MP**

**Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jateng: Bp. Widi Hartanto , ST. MT**

**Ka. DKP Prov. Jateng: Bp. Ir. Fendiawan Tiskiantoro, M.Si**

## LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

### Gudang Perum Bulog Semarang



### PT Sumber Samudera Indonesia





### Posko Penanganan Banjir Demak



## LIPUTAN MEDIA

### **Komisi IV DPR Perjuangkan Perbaikan Lahan Pertanian Akibat Banjir di Demak**

Demak, Kompas 1 Net- Komisi IV DPR RI berkomitmen memperjuangkan perbaikan lahan yang rusak akibat dari banjir yang merendam sekitar 3.427 hektare sawah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pihaknya juga menyoroti sarana infrastruktur jaringan irigasi yang perlu direvitalisasi, selain memang kondisinya yang sudah usang karena dibangun sejak era delapan puluh tahunan dan minim pemeliharaan.

Menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan, potensi kerugian dari banjir tersebut bisa mencapai Rp70 milyar. Hal itu karena banjir ini berdampak kepada hasil produksi padi yang tidak optimal, di tengah kondisi kelangkaan beras yang ada di masyarakat. Selain itu, sarana infrastruktur jaringan irigasi yang minim pemeliharaan juga menjadi perhatian.

"Nanti akan kami sampaikan kepada Menteri Pertanian. Kedepan agar jaringan-jaringan irigasi tersebut akan menjadi kunci juga bagi peningkatan produksi beras kita, tidak hanya selalu pupuk yang menjadi perhatian utama," ujar Budhy kepada Parlemenaria mengunjungi posko penanganan banjir di Kabupaten Demak, Jateng, Kamis (29/2/2024).

Politisi F-Golkar ini mengatakan, terkait penanganan rusaknya lahan pertanian sekitar 3000 hektare, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan jajaran Kementerian Pertanian sudah menyiapkan langkah-langkah dalam upayanya agar lahan pertanian tersebut bisa digunakan kembali. Dengan harapan, lahan pertanian tersebut dapat kembali memberikan kontribusi terhadap produksi padi di Kabupaten Demak.

"Kami sudah meminta perhatian dari Kementerian PUPR untuk bisa mendapatkan perhatian, karena tanggul ataupun saluran irigasi ini berkontribusi terhadap produksi beras nasional kita"

"Kami tadi juga sudah meminta agar wilayah-wilayah irigasi lainnya yang ada di Kabupaten Demak direvitalisasi, karena sangat mungkin rawan jebol ke depannya. Tadi disampaikan juga oleh salah satu camat, masih banyak titik-titik yang memang memerlukan penanganan pemeliharaan. Kami sudah meminta perhatian dari Kementerian PUPR untuk bisa mendapatkan perhatian, karena tanggul ataupun saluran irigasi ini berkontribusi terhadap produksi beras nasional kita. Ini harus menjadi perhatian lintas kementerian terhadap pemeliharaan dari jaringan-jaringan irigasi ini," pungkas Budhy.

Selain itu, Legislator Dapil Jabar III ini juga meminta perhatian Pemerintah Daerah turut serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini. Kalau untuk jaringan irigasi primer tentu menjadi tupoksinya Pemerintah Pusat, tetapi jaringan anak-anak sungainya bisa menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah.

"Jadi kita berharap bahwa, masalah ini bisa dikerjakan secara gotong-royong dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah. Kami nanti akan melakukan rapat internal dulu di Komisi IV DPR untuk kemudian menindaklanjuti hasil kunjungan kerja reses ini, nanti akan kami putuskan di rapat internal apakah perlu rapat lintas komisi yang terkait. Yang pasti kami ingin nanti ada kesepakatan dari pemerintah terhadap perhatian kepada jaringan-jaringan irigasi ini," ucap Budhy. (jk/rdn)

Sumber: <https://www.kompas1.net/komisi-iv-dpr-perjuangkan-perbaikan-lahan-pertanian-akibat-banjir-di-demak/>

Sumber lainnya:

1. <https://www.bukamata.co/parlemen/50273946/pengelolaan-data-pangan-pemerintah-buruk-legislator-minta-bulog-dan-bapanas-perlu-pengaturan-tata-niaga-yang-baik>
2. <https://www.pantau.com/ekonomi/199386/data-harga-bulog-dan-bapanas-berbeda-hermanto-perlu-tata-niaga-pangan-yang-baik>
3. <https://sindikatpost.com/2024/03/02/komisi-iv-komitmen-perjuangkan-perbaikan-lahan-rusak-akibat-banjir-di-demak/>
4. <https://beritajateng.tv/kerugian-lahan-pertanian-terdampak-banjir-di-demak-rp-70-miliar/>
5. <https://radarsemarang.jawapos.com/demak/724391904/ditinjau-dpr-ri-pemkab-demak-fokus-penanganan-pasca-banjir>
6. <https://sippn.menpan.go.id/berita/122252/dinas-pertanian-dan-pangan-kabupaten-demak/kunjungan-kerja-dan-penyerahan-bantuan-komisi-iv-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia-kepada-petani-yang-terdampak-banjir-di-kabupaten-demak>
7. <https://radarsemarang.jawapos.com/demak/724391904/ditinjau-dpr-ri-pemkab-demak-fokus-penanganan-pasca-banjir>